

ABSTRACT

Lulu Siti Lugoyah: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Majalaya

This study is based on the interest of the writer on environmental issues that occurred in Bandung, especially in Majalaya subdistrict. The environmental problems are congestion and environmental hygiene, which is caused by the street vendors who make a sidewalk and a road as a place of trading. Based on the data taken in 2014, there were 815 street vendors and 283 illegal buildings used as the trading places.

This study aims to find out the implementation of the local regulation policy on the controlling of traffickers in Majalaya subdistrict, as the factors that hamper the achievement of the control policy implementation and the efforts to overcome the inhibiting factors.

The theory used in this study refers to the theory of policy implementation proposed by Van Meter and Van Horn with 6 dimensions: Standard and Target Policy, Resources, Inter-Organization of Communication, Characteristics of Implementing Agent, Social Conditions, Economics, Politics and Implementor Disposition.

The method used in this study is qualitative descriptive. The use of descriptive method is tailored to the purpose of this research that provides an overview of the policy implementation of curbing peddlers in Majalaya subdistrict. The collecting data techniques used are literature study, interview with informants and observation. The determination of informant is used with the goal determination technique. The data analysis techniques used SWOT analysis.

The results of the study found that- for the first, the policy implementation of curbing peddlers in Majalaya has been implemented, but not yet maximal because there are still obstacles in the process of controlling. The programs which are undertaken by the government in overcoming the street vendors through the curbing, structuring and fostering street vendor programs. The second, the obstacles that impede the policy implementation of the street vendors are limited resources, lack of coordination between district level SKPD and there is no local regulation that specifically discusses the structuring and fostering of the street vendors in Bandung, then it has not formed as a coordinating team of arrangement and empowering street vendors. The third, the effort in facing the problem that provides and maximize the resources, build the coordination between the district level SKPD and the formulation of local regulation, then, build a coordinating team of arranging and fostering of the street vendors.

Keywords: Policy Implementation

ABSTRAK

Lulu Siti Lugoyah: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Majalaya

Penelitian ini dilatar belakangi dengan ketertarikan penulis terhadap permasalahan mengenai lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Majalaya. Permasalahan lingkungan tersebut yaitu kemacetan dan kebersihan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya para pedagang kaki lima yang menjadikan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berdagang. Berdasarkan data yang diambil yaitu tahun 2014, terdapat sebanyak 815 pedagang kaki lima dan 283 bangunan liar yang dijadikan tempat berdagang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Majalaya, faktor yang menghambat pencapaian implementasi kebijakan penertiban dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang menghambat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dengan 6 dimensi yaitu: Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik Dan Disposisi Implementor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk memberi gambaran mengenai implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Majalaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan, wawancara dengan informan dan observasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik penentuan tujuan. Teknik analisis menggunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Majalaya telah dilaksanakan namun belum maksimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam proses penertiban. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pedagang kaki lima yaitu melalui program penertiban, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Kedua kendala-kendala yang menghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima yaitu keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan, kurangnya koordinasi antar SKPD tingkat Kabupaten dan belum ada Peraturan daerah yang secara spesifik membahas mengenai penataan dan pembinaan PKL di wilayah Kabupaten Bandung serta belum dibentuk tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ketiga, upaya dalam menghadapi masalah tersebut yaitu menyediakan dan memaksimalkan sumber daya yang dibutuhkan, membangun koordinasi diantara SKPD Kabupaten dan pembentukan peraturan daerah serta membentuk tim koordinasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan